PENGARUH PENGENDALIAN INTERN DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Survey Pada Dinas Pemerintah Kota Bandung)

Fera Sri Ferina

Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia

Abstract

This research was conducted at the Department in the city of Bandung. The phenomenon that occurs is the performance of the Department of Transportation (Transportation) Bandung rated not shown satisfactory results. Some of the Setup program in the city transport system largely run well. Leakage parking fees, not maximum operation of Trans Metro Bandung (TMB), up rerouting plans and repooling public transportation, be a bad record Dishub performance in recent times.

This study aimed to analyze the influence of internal control and budgetary participation of local government performance. This research was conducted at the Department in the city of Bandung.

The method used in this research, descriptive and verification method. Statistical test used is structural modeling, designing measurement model, construct the path diagram, the test model fit. Suitability test structural models and hypotheses using SmartPLS software v.3.2.4.

The results of this study indicate internal control and budgeting participation has a significant positive effect on the performance of local government at the Department of Bandung.

Keyword: *Internal Control, Participation Budgeting, and Performance Local Government.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara mempunyai suatu pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintahan pusat maupun Pemerintahan daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas Pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan. Pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan (Wawan dan Lia,2009). *Local government* (pemerintah daerah/lokal) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan prinsip *good governance*. *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik *(public good and services*). Prinsip-prinsip *good governance* antara lain adalah prinsip efektifitas *(effectiveness*), keadilan *(equity)*, partisipasi *(participation)*, akuntabilitas *(accountability)*, dan transparansi *(transparency)* (Basri, 2007:46). Kinerja adalah Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. (Mohamad Mahsun, 2013:25)

Dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi Negara secara menyeluruh (LAN, 2000). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah (Abdul Rohman, 2009).

Faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dan meminimalkan permasalahan-permasalahan operasional adalah menyelenggarakan suatu sistem pengendalian manajemen atau yang juga sering disebut sebagai sistem pengendalian intern, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Rahmadi Murwanto,2012:180).

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijadikan oleh dewan komisaris manajemen, dan personal lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: 1. Keandalan informasi keuangan 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 3. Efektivitas dan efisien operasi" (Mulyadi, 2002). Pengendalian Intern dalam penerapannya harus senantiasa memperhatikan norma keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah (Mulyani, 2011).

Manajemen pemerintah daerah, dituntut untuk membangun instrument informasi keuangan yang memadai dan andal agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan yang rasional dalam mekanisme perencanaan dan pengendalian. Informasi keuangan tersebut tidak saja diperlukan untuk keperluan manajemen (intern) pemda, melainkan juga untuk memenuhi keperluan pihak luar (ekstern) pemda dalam rangka pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja (Abdul Rohman, 2009).

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun nonmoneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasi". Oleh karena pentingnya anggaran dalam suatu perusahaan, dibutuhkan penyusunan anggaran yang baik. Anggaran yang disusun hendaknya dapat mengakomodir kepentingan setiap departemen yang terkait dalam pelaksanaanya. Untuk itu diperlukan partisipasi dalam penyusunan anggaran oleh berbagai pihak. Baik dari manajemen tingkat atas *(toplevel management)* maupun manajemen tingkat bawah *(lower level management*). Pihak-pihak inilah yang akan memainkan peranan penting dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dari partisipasi dalam proses penyusunan anggaran" (Hansen dan Mowen, 2004:345)

Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Unit satuan kerja dipandang memiliki peranan utama dalam oprasional roda pemerintahan didaerah, karena unit satuan kerja merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban pemerintah daerah dan relatif lebih banyak melaksanakan tugas operasional pemerintahan dan lebih banyak mengkomsumsi sumber daya, yang tentunya harus diperuntukkan dan dipertanggungjawabkan pada kepentingan publik (Wawan Sukmawan dan Lia Anggarsari:2009).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:86) "Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran, yaitu *top-down* (pendekatan dari atas ke bawah), *bottom-up* (pendekatan dari bawah ke atas) dan pendekatan lain yang merupakan gabungan dari kedua pendekatan tersebut, yaitu pendekatan partisipasi". Inti dari partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah diperlukan kerjasama antara seluruh tingkatan organisasi. Manajer puncak biasanya kurang mengetahui bagian sehari-hari, sehingga harus mengandalkan informasi anggaran yang lebih rinci dari bawahannya. Dari sisi lain, manajer puncak mempunyai wawasan yang lebih luas atas perusahaan secara umum. "Setiap tingkatan tanggung jawab dalam suatu organisasi harus memberikan masukan terbaik sesuai dengan bidangnya dalam suatu sistem kerjasama penyusunan anggaran (Garrison dan Noreen, 2000:409).

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di dapat maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung
2. Seberapa besar pengaruh penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan mengumpulkan data yang akurat dan relevan dengan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi mengenai pengendalian intern, partisipasi penyusunan anggaran, dan kinerja pemerintah daerah Kegunaan praktis penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Instansi
   Sebagai bahan pemikiran bagi Inspektorat untuk dapat mengetahui pengaruh signifikan dari pengendalian intern dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan.
2. Bagi Pihak Lain
   Sebagai informasi, bahanrujukan dan referensi bagi pengembangan konsep tentang bagaimana pengaruh pengendalian intern, partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah

1.4.2 Kegunaaan Akademis

1. Bagi pengembang ilmu akuntansi sektor publik
   Dapat menambah pengetahuan dan memberikan referensi ilmiah khususnya akuntansi sektor publik mengenai pengaruh pengendalian intern dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dengan membuktikan teori serta hasil penelitian terdahulu.
2. Bagi peneliti
   Dapat meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta memecahkan masalah yang diangkat penulis mengenai pengendalian intern dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini juga berguna untuk sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Komputer (UNIKOM) Indonesia Bandung.
3. Bagi peneliti lain
   Diharapkan dapat memberikanpengetahuan dan informasi atau referensi yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut mengenai pengendalian intern dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

1. Pengendalian Intern

Menurut Rahmadi Murwanto (2012:195) adalah Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi, pengendalian intern juga terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja.

2. Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut Ida Bagus (2010:19) menjelaskan partisipasi penyusunan anggaran adalah Partisipasi penyusunan anggaran adalah proses pengambilan keputusan bersama dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya, dengan kata lain pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam prosesnya.

3. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Chabib Soleh dan Suripto (2011:3) Pengertian Kinerja adalah Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu organisasi.

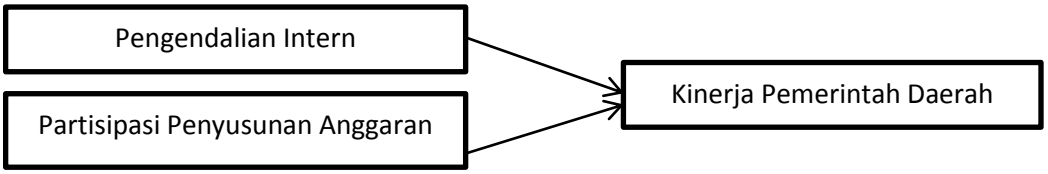
2.2 Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Rahmadi Murwanto (2012:195) mengungkapkan bahwa pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja. Pengendalian intern juga berperanan sebagai perlindungan di garis depan dalam menjaga aset/harta dan mencegah dan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan. Pengendalian intern membantu manajemen instansi pemerintah dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik yang efektif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ira Amelia, dkk (2014) menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan, Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

2. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Ida Bagus Agung (2010:19) partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja menjelaskan sebagai berikut : “Partisipasi akan menguntungkan suatu organisasi perusahaan. Partisipasi telah menunjukkan dampak positif terhadap sikap karyawan, meningkatkan kerja sama diantara manajer. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Riza Lestari, dkk (2014) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sisca Mutiara Sari, dkk (2014) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dianita (2009) dan Arifin (2012) yang menyebutkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

H_2 : Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya desain penelitian, agar penelitian yang dilakukan lebih teratur dan sistematis. Dengan membuat desain penelitian, penyusunan sebuah karya tulis pun akan dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Desain penelitian menurut Husein Umar adalah sebagai berikut : "Desain penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian" Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan suatu cara bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian secara baik dan sistematis. Oleh karena itu, membuat desain penelitian sangat penting agar pembuatan sebuah karya tulis dapat terselesaikan secara cepat dan baik. Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa desain penelitian merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu. Menurut Sugiono terdapat enam aspek utama didalam proses penelitian yaitu:

1. Rumusan Masalah
2. Landasan Teori
3. Perumusan hipotesis
4. Pengumpulan data
5. Analisis data
6. Kesimpulan dan saran.

Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan, dengan pertanyaan ini maka akan dapat membantu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung
2. Seberapa besar pengaruh penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Teori dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab semua rumusan masalah penelitian tersebut. Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kuat bukan sekedar perbuatan coba – coba. Adanya landasan teori ini merupakan ciri bahwa penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Karena itu dalam penelitian ini, penulis memasukkan teori – teori yang berhubungan dengan judul yang diambil.

Jawaban terhadap rumusan masalah yang berdasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris (faktual) maka jawaban itu disebut hipotesis. Hipotesis yang dibuat pada penelitian ini adalah Terdapat pengaruh pengendalian intern dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Bandung.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen Pengendalian Intern dan Partisipasi Penyusunan Anggaran serta variabel dependen Kinerja pemerintah Daerah Adapun tabel operasionalisasi sesuai dengan variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionaliasi Variabel

No	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	No Kuesioner
1	Pengendalian Intern (X_1)	Pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi, pengendalian intern juga terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja **Rahmadi Murwanto (2012:195)**	1. Lingkungan Control *(control environment)*	Ordinal	1-2
			2. Penaksiran Risiko *(Risk Assessment)*		3
			3. Aktivitas Pengendalian *(Control activities)*		4-5
			4. Informasi dan Komunikasi *(informasi and Communication*)		6
			5. Pemantauan *(Monitoring)* **Indra Bastian (2011:11)**		7-8
2	Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_2)	Adanya keterlibatan upaya dan input oleh manajer dalam penyusunan anggaran. **Ida Bagus Agung D (2010:80)**	1. Keterlibatan	Ordinal	9-10
			2. Pengaruh		11-12
			3. Komitmen **Ida Bagus (2010)**		13-14
3	Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan, perencanaan strategis (strategic, planning) suatu organisasi. **Chabib Soleh dan Suripto (2011:3)**	1. Indikator masukan (Input)	Ordinal	15-16
			2. Indikator proses (Process)		17-18
			3. Indikator keluaran (Output)		19
			4. Indikator hasil (Outcomes)		20
			5. Indikator manfaat (Benefit)		21
			6. Indikator dampak (Impact) **Pasolong (2013:177)**		22

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan guna mendapatkan data untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Field Reseach (Penelitian Secara Langsung)
   a. Observasi, peneliti terlebih dahulu menentukan tempat penelitian dan melakukan survey terhadap tempat dalam hal penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah.
   b. Kuesioner, teknik kuesioner yang peneliti gunakan adalah kuesioner tertutup. Suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Sub. Bagian keuangan, Sub. Bagian akuntansi Dengan harapan mereka bisa memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
   c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung kepada pegawai Dinas Kota Bandung mengenai pengendalian intern, partisipasi penyusunan anggaran, dan kinerja pemerintah daerah
2. Library Reseach (Studi Pustaka)

   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku, jurnal, artikel, peraturan perundang – undangan , website dan penelitian – penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3.4 Teknik Penarikan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2014:80), mengemukakan pengertian populasi sebagai berikut: Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas Kota Bandung. Unit observasi dalam penelitian ini adalah Kepala dinas 17orang , Sub. Bagian Program dan Anggaran 34 orang dan Bidang Pengendalian 17 orang.

3.4.2 Sampel

Menurut Umi Narimawati (2010:38) adalah sebagai berikut Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian". Dalam penelitian ini penulis melakukan penarikan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2011:126) mengatakan bahwa Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah seluruh dari populasi yaitu Kepala dinas 17orang , Sub. Bagian Program dan Anggaran 34 orang dan Bidang Pengendalian 17 orang.

3.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi, cara ini telah mudah dibandingkan dengan menghitung seluruh anggota populasi. Setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji pernyataan populasi, apakah bukti empiris dari sampel mendukung atau menolak pernyataan mengenai populasi. Seluruh proses tersebut dikenal dengan pengujian hipotesis.

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K (2009:112) pengujian hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

> "Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan

oleh karenanya harus ditolak".

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H_0 ditolak jika t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,05 sebesar 1,999.

1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Persamaan model struktural:

$$\eta = \beta \xi_1 + \zeta$$

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* dengan 5 indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 6 indikator. Model struktural yang akan diuji digambarkan sebagai berikut:

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan dengan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

H_o : β = 0 : Pengaruh ξ_1 terhadap η tidak signifikan

H_1 : β ≠ 0 : Pengaruh ξ_1 terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\beta}{SE(\beta)}$$

Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk α = 0,05 sebesar 1,999.

2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Persamaan model struktural:

$$\eta = \gamma \xi_{2+} \zeta$$

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* dengan 3 indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 6 indikator

Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

H_o : γ = 0 : Pengaruh ξ_2 terhadap η tidak signifikan

H_1 : γ ≠ 0 : Pengaruh ξ_2 terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$t = \frac{\lambda}{SE(\lambda)}$$

Tolak H_o jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk α = 0,05 sebesar 1,999.

3) Menggambarkan Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap sebuah hipotesis dapat digambarkan dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.



Sumber : Sugiyono dalam Umi Narimawati (2010:54)

Gambar 3.2
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengendalian Intern

Berdasarkan Persentase Skor Jawaban Responden memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel pengendalian intern sebesar 79%, menurut tabel 3.8 angka tersebut termasuk kategori Baik karena berada pada interval 68,01 % - 84,00 %. Besaran ini tidak mencapai 100% dan memiliki gap yaitu sebesar 21%. Gap sebesar 29% ini menunjukan penyebab Pengendalian Intern (X_1) pada Dinas di Kota Bandung belum mencapai tingkat ideal.

4.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran

Berdasarkan Persentase Skor Jawaban Responden memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel partisipasi penyusunan anggaran sebesar 65%, menurut tabel 3.8 angka tersebur termasuk kategori Cukup Baik karena berada pada interval 52,01 % - 68,00 %. Besaran ini tidak mencapai 100% dan memiliki gap yaitu sebesar 35%. Gap sebesar 35% ini menunjukan penyebab Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_1) pada Dinas di Kota Bandung belum mencapai tingkat ideal.

4.3 Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Persentase Skor Jawaban Responden memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kinerja pemerintah daerah sebesar 82%, menurut tabel 3.9 angka tersebut termasuk kategori Baik karena berada pada interval 68,01 % - 84,00 %. Besaran ini tidak mencapai 100% dan memiliki gap sebesar 18%. Gap sebesar 18% ini menunjukan penyebab Kinerja Pemda pada Dinas di Kota Bandung belum mencapai tingkat ideal.

4.4 Analisis Verifikatif

1. Keterkaitan Pengendalian Intern dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Nilai koefisien korelasi menunjukan keeratan hubungan antara variabel laten *eksogen* dengan variabel laten *endogen*. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *software SmartPLS* v.3.2.4, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1
Koefisien Korelasi

Variabel Laten	Korelasi	t_{hitung}
Pengendalian Intern (X_1) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0.488	0.926
Partisipasi penyusunan anggaran (X_2) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0.511	0.999

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.4

a) Nilai koefisien korelasi yang diperoleh untuk variabel Pengendalian Intern (X_1) dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0.488, berdasarkan pada tabel 3.10, angka tersebut termasuk dalam kategori *Moderate correlation/Substantial relationship/*Cukup Baik karena berada pada interval 0.40-0.69. nilai koefisien korelasi bertanda positif yang menandakan hubungan yang searah, artinya jika Pengendalian Intern dilakukan dengan Cukup Baik maka akan berdampak pada semakin baik pula terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
b) Nilai koefisien korelasi yang diperoleh untuk variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_2) dengan Kinerja Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 0.511, berdasarkan pada tabel 3.10, angka tersebut termasuk dalam kategori *Moderate correlation/Substantial relationship/*Cukup Baik karena berada pada interval 0.40-0.69. nilai koefisien korelasi bertanda positif yang menandakan hubungan yang searah, artinya jika semakin baiknya penerapan Partisipasi Penyusunan Anggaran maka akan berdampak pada semakin baik pula terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Pengendalian Intern dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Koefisien determinasi merupakan angka yang menunjukan sebesar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan perangkat lunak bantuan SmartPLS v.3.2.4, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2
Koefisien Determinasi

Variabel Laten	R_{square}
Pengendalian Intern (X_1) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0.373
partisipasi penyusunan anggaran (X_2) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.4

Pada tabel 4.2 di atas, terlihat nilai R_{Square} yang diperoleh adalah sebesar 0,373 atau 37.3%. Hasil tersebut menunjukan bahwa Penerapan Pengendalian Intern (X_1) dan Partisipasi Penyusunan Anggaran (X_2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 37.3% terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y), sedangkan sebanyak (1-R_{Square}) 62.7% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Berdasarkan kriteria penilaian koefisien determinasi pada tabel 3.11, termasuk kriteria yang sedang/Cukup Baik karena berada pada interval $0.16 \leq R^2 < 0.49$. Untuk mengetahui besar kontribusi pengaruh dari setiap variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Kontribusi Pengaruh Variabel Laten *Eksogen* terhadap Variabel Laten *Endogen*

Variabel Laten	Koefisien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung		Total Pengaruh
			X_1	X_2	
Pengendalian Intern (X_1) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0.355	0.355^2=13%		4.65	17.65%
partisipasi penyusunan anggaran (X_2) > Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	0.390	0.390^2=15%	4.65		19.65%
Total					37.30%

Sumber: Data diolah menggunakan *SmartPLS* v.3.2.4

Nilai-nilai yang tersaji pada tabel 4.3 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengendalian Intern memberikan pengaruh secara parsial sebesar 17.65% terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan rincian 13% pengaruh langsung dan 4.65% merupakan pengaruh tidak langsung melalui partisipasi penyusunan anggaran.
b) Partisipasi Penyusunan Anggaran memberikan pengaruh secara parsial sebesar 19.65% terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan rincian 15% pengaruh langsung dan 4.65% merupakan pengaruh tidak langsung melalui pengendalian intern.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memberikan pengaruh sebesar 17.65%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Cukup Baik yaitu sebesar 0.488 (0.40-0.69). t_{hitung} diperoleh sebesar 2.755, nilai ini lebih besar dari pada t_{tabel} 1.999, sehingga dapat disimpulkan bahawa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang berarti Pengendalian Intern memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kota Bandung. Pengendalian Intern memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan semakin baik Pengendalian Intern yang dilakukan maka akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah semakin baik pula. Dalam penelitian ini Pengawaasan Intern belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap sebesar 21% (100%-79%), berarti bahwa Pengendalian Intern belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam Pengendalian Intern.

   Hasil penelitian dengan arah hubungan yang positif ini juga di dukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yaitu Menurut Mardiasmo (2002:143) untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang sesuai dengan value for money (economy, efficiency, effective), perlu peningkatan fungsi aparat pemeriksaan fungsional pemerintah dilingkungan pemerintah daerah. Dalam bukunya Boynton (2006) menyatakan fungsi aparat pemeriksaan fungsional melaksanakan fungsi pengendalian intern (intern control) yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Lalu menurut Rahmadi Murwanto (2012:195) mengungkapkan bahwa pengendalian intern merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen berbasis kinerja.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penlitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ira Amelia, dkk (2014) menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan, Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik. Sedangkan hasil penelitan yang telah dilakukan oleh Rina Tresnawati (2012) juga menyatakan dalam penelitiannya tentang pengaruh efektifitas pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Lalu hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Azwir Nasir dan Ranti Oktari (2011) dalam penelitiannya tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Kampar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memberikan pengaruh sebesar 19.65%, dengan tingkat keeratan korelasi yang Cukup Baik yaitu sebesar 0.511 (0.40-0.69). t_{hitung} diperoleh sebesar 2.738, nilai ini lebih besar dari pada t_{tabel} 1.999, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang berarti Partisipasi Penyusunan Anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kota Bandung. Partisipasi penyusunan anggaran memberikan pengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan semakin baik Partisipasi Penyusunan Anggaran yang dilakukan maka akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah semakin baik pula. Dalam penelitian ini Partisipasi Penyusunan Anggaran belum mencapai titik ideal atau belum mencapai target dimana masih terdapat gap yang Cukup Baik besar yaitu sebesar 35% (100%-65%), sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran belum berjalan dengan baik atau masih terdapat masalah yang terjadi dalam partisipasi penyusunan anggaran.

   Hasil penelitian yang menunjukan arah hubungan yang positif ini juga di dukung oleh teori pada pembahasan sebelumnya yaitu menurut Indriantono dalam Abriyani Puspaningsih (2003:96). Partisipasi penyusunan anggaran merupakan hal yang signifikan untuk dipertimbangkan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap keefektifan suatu organisasiHal ini disebabkan partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap banyak faktor seperti motivasi, kinerja, kepuasan kerja. Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran (Abriyani Puspaningsih:2003).

   Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dolakukan oleh Ni Luh Sri Rahayu, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014) dalam penelitiannya tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah menemukan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sisca Mutiara Sari, dkk (2014) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dianita (2009) dan Arifin (2012) yang menyebutkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, serta beberapa pengujian penelitian mengenai Pengaruh Pengendalian Intern dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada 17 Dinas di Kota Bandung, maka dapat di rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah daerah pada 17 Dinas di Kota Bandung berpengaruh signifikan, besar pengaruh sebesar 17.65% dengan arah hubungan yang positif,

artinya saat Pengendalian Intern dilakukan dengan baik, maka Kinerja Pemerintah Daerah pun akan semakin baik pula dan juga sebaliknya. Tingkat keeratan korelasinya termasuk kategori Cukup yaitu sebesar 0.488 (0.40-0.69).

Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada 17 Dinas di Kota Bandung berpengaruh signifikan, besar pengaruhnya adalah 19.65% dengan arah hubungan yang positif atau searah, artinya semakin baiknya partisipasi dalam penyusunan anggaran, akan membuat kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Kota Bandung akan semakin baik pula dan juga sebaliknya. Tingkat keeratan korelasi termasuk dalam kategori Cukup yaitu sebesar 0.511 (0.40-0.69).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai pengaruh Pengendalian Intern dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

5.2.1Saran Praktis

Bagi instansi disarankan untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern, sebaiknya dalam aktivitas pengendalian pada anggaran dan pemisahan tugas dilakukan dengan baik. Kemudian instansi juga disarankan untuk meningkatkan pemantauan. Kondisi dimana seluruh sistem pengendalian organisasi harus dimonitor untuk menilai mutu dari sistem pengendalian tersebut. Kelemahan dalam sistem pengendalian harus dilaporkan kepada manajemen tingkat atas dan harus dilakukan evaluasi.

Selain itu, instansi juga disarankan untuk memperbaiki anggaran yang boros sebaiknya semua pihak terkait dilibatkan pada proses penyusunan anggaran dan semua pihak terkait tersebut tidak hanya dilibatkan tetapi mereka diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi memberikan pendapat. Selain dari pada itu adapun masalah yang paling kurang baik yaitu pada komitmen salah satunya pada pendapat pegawai yang tidak diterima saat penyusunan anggaran. Dengan memperbaiki masalah keterlibatan, pengaruh, komitmen maka partisipasi penyusunan anggaran akan berjalan dengan baik dan akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah yang semakin baik pula.

Kemudian, instansi juga disarankan untuk merumuskan proses kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan yang akan di jalankan. Agar dampak yang dihasilkan memuaskan.

5.2.2 Saran Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian. Bagi peneliti selanjutnya disarankan sebaiknya memperluas, meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta memecahkan masalah yang diangkat penulis mengenai pengendalian intern dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

VI Daftar Pustaka

Anthony, R, Vijay Govindarajan. 2005. *Management Control System*, Jilid I dan II, Terjemhan Kurniawan Tjakrawala dan Krista, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Chabib Soleh dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah* Jatinangor: FOKUSMEDIA

Dhaemanegara, Ida Bagus Agung. 2010. *Penganggaran Perusahaan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Garrison, Ray H., Norren, Eric W, 2000. Managerial Accounting, Terjemahan Budi Santoso, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Hansen, D.R., M.Owen, M. 2004. *Management Accounting*, Terjemahan Dewi Fitriasari, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja* Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Mulyadi, 2002. *Auditing*, Edisi Keenam. Jakarta : Salemba
Mulyani, Pujianik. Rindah F.Suryawati. 2011. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 7, Nomor 2, September 2011
Rohman, Abdul. (2009). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 21-32.
Rahmadi Murwanto. 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. LPKPAP
Sugiyono.2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kuaitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung
Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

Jurnal:

Azwir Nasir dan Ranti Oktari. 2011. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar).* Jurnal Ekonomi Vol 19, No 02 (2011) ISSN 0853-7593
Ira Amelia, Desmiyawati dan Nur Azlina. 2014. *Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan).* Jom FEKON Vol 1 No 1 2014. ISSN: 2355-6854
Ni Luh Sri Rahayu, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm), Dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.* e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)
Rina Tresnawati. 2012. *Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.* Forum Bisnis & Keuangan I, Th. 2012. Prosiding Seminar Nasional ISBN : 978-602-17225-0-3
Riza Lestari dkk. 2014. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Dengan Gaya Kepemimpinan, Desentralisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Rokan Hilir).* JOM FEKON Vol 1 No 2 Oktober 2014 ISSN: 2355-6854.
Sisca Mutiara Sari, Kimizi dan Yuneita Anisma. 2014. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kota Pekanbaru)*. JOM FEKON Vol 1 No 2 Oktober 2014 ISSN: 2355-6854.
Wawan Sukmana Dan Lia Anggarsari. 2009. *Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya*). Jurnal Akuntansi Fe Unsil, Vol. 4, No 1, 2009.